

**ANALISIS PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT  
DI DESA MANGEMPANG, KECAMATAN  
BUNGAYA, KABUPATEN GOWA PROPINSI  
SULAWESI SELATAN**



**L.M. AKHDATUL.A.**  
**M 111 03 011**



UNIVERSITAS HASANUDDIN
31-7-08
Kehutanan
TEKS
Hasanah
Sikr - KH 00
AKH
a.

**JURUSAN MANAJEMEN HUTAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2008**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Pengembangan Hutan Rakyat Di Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa  
Nama : L. M. Akhdatul. A.  
NIM : M 111 03 011  
Program Studi : Manajemen Hutan

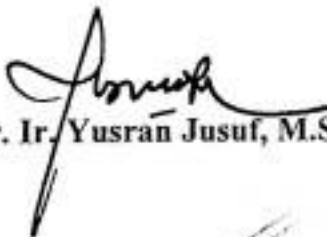
Skripsi ini Disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan

pada

Program Studi Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin

Menyetujui  
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

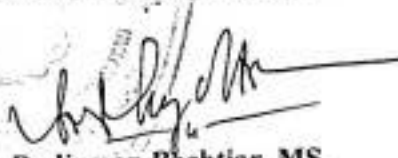
  
Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si

Pembimbing II

  
Dr. Ir. H. Mas'ud Junus, M.Sc

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin

  
Ir. Budirman Bachtiar, MS  
Nip. 131 570 887

Tanggal Lulus : 17 Juli 2008

## ABSTRAK

**L. M. AKHDATUL.A. (M 111 03 011) Analisis Pengembangan Hutan Rakyat di Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan di bawah bimbingan Yusran Jusuf dan Mas'ud Junus.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan Hutan Rakyat Di Desa mangempang. Penelitian dilaksanakan bulan Desember 2007 sampai bulan Maret 2008. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dikaji secara mendalam mengenai Hutan Rakyat yang akan di kembangkan di Desa Mangempang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan lahan di Desa Mangempang berstatus tanah milik yang memungkinkan dikembangkannya hutan rakyat. Masyarakat mangempag memiliki kelompok usaha sendiri berupa kelompok tani dengan mengembangkan tanaman kehutanan dari jenis tanaman Akasia (*Acacia mangium*), Sengon (*Paraserianthes falcataria*), dan Gmelina (*Gmelina arborea*). Pelayanan pemerintah di Desa Mangempang yang telah dilakukan berupa penyuluhan terkait pembangunan hutan, pemberian bantuan secara bertahap, dan memfasilitasi insvestor untuk ikut membangun hutan. Desa Mangempang memiliki potensi lahan berupa kawasan lahan milik yang memungkinkan dikembangkannya Hutan Rakyat dengan mengadopsi konsep pengembangan Hutan Tanaman Rakyat pola kemitraan.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pemerintah dapat mendukung pengembangan Hutan Rakyat di Desa Mangempang dengan membuka akses pasar dan bantuan permodalan bagi masyarakat yang membangun Hutan Rakyat.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugrahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Analisis Kelayakan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, Propensi Sulawesi Selatan.”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Manajemen Hutan, pada Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini dapat terwujud karena adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Teledan hidupku ayahanda **Laode Muh Natsir** dan ibunda tercinta **Waode Ledy** atas segala Jeri payah, dukungan, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tiada hentinya diberikan demi menyelesaikan studi penulis.
2. Untuk Orang-orang tercinta yang telah ke Rahmatullah tanpa sempat menyaksikan penulis menyelesaikan skripsinya “ Kakek tersayang (Alm) **La Ode Mauzudu**, (Alm) **Wa Ode Kaasia** tercinta, dan (Alm) **Wa Ode Unzila**” terima kasih banyak atas doa, dukungan, semangat, kasih sayang, teguran, dan keikhlasan.
3. Bapak **Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Ir. H. Mas’ud Junus, M.Sc** selaku pembimbing II yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
4. Bapak **Dr. Ir. H. Syamsu Alam, MS**, Bapak **Dr. Ir. H. Muh. Restu, MP** dan Bapak **Ir. Abd Rasyid Kalu, MS**, sebagai dosen penguji dari jurusan Manajemenn hutan atas masukan dan arahannya kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Ir. H. Muh. Restu, MP**, Selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
6. Bapak **prof. Dr. Ir. Sampe paembonang, M. Sc** selaku penasehat akademik

7. **Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Pegawai Administrasi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.**
8. Untuk saudara-saudaraku " **Waode Sherly Indriani, L.M. Al Ikbal, Waode Sitti Rufaidah, L.M. Kasaful hikam, dan L.M. Hatam Maulah**" Terimakasih atas semua dukungan, bantuan dan doanya sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.
9. Untuk Paman-pamanku "**L.M. Bahtiar, L.M. Sahtiar, dan L.M. Dirham**" Terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang dipersembahkan untuk penulis.
10. Sahabat-sahabatku tercinta " **(Alm) Catur Hadiwibowo, Rohandy Yusuf, Ulu, Adrianti Z, Ningsih, Mimi, Ati, Hera, dan Desi**" untuk kebersamaannya selama ini yang selalu mendukung, memotifasi, dan mendoakan.
11. Teman-teman seperjuangan " **Muh. Daniel, Nahda dan Qory**" terima kasih banyak buat semua bantuan dan motifasinya.
12. Saudara-saudaraku **angkatan 2003** terima kasih banyak atas dukungan-dukungannya selama ini.
13. Teman-teman KKN " **Iwan, Kalua, Lopez, Domi, Ata, Ira, Fitha, Yuna, Yuki, Waode, Omi, dan Jeni**" terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis.
14. Saudara-saudara dipondok semangat "**K'Naim, K'Uma, Chiwank, Ope, Kahar, Ridho, Udin, Adi, Boncel, Nani, Irman, Ani, Risna, Asma, Jusni, Umra, dan Irwan**" terima kasih atas segala dukungan, motifasi, dan fasilitas-fasilitas yang diberikan.
15. "**Jala, Uki, Adi, Sul Fikar, dan Herman**" terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.
16. **Seluruh keluarga besar di Buton, Kendari, dan Kolaka** yang selalu mendoakan penulis dengan tulus.

dalam skripsi ini akan ditemukan begitu banyak kekurangan disebabkan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat berguna juga untuk penulis skripsi selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menyumbangkan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Makassar, Juni 2008

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan.....	3
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hutan Dan Kehutanan.....	4
B. Kebijakan Kehutanan.....	4
C. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.....	5
D. Hutan Tanaman Rakyat.....	6
E. Hutan Rakyat.....	8
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	10
B. Alat dan Bahan.....	10
C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data.....	10
D. Variabel Penelitian.....	10
E. Analisis Data.....	11
F. Konsep Operasional.....	11





#### IV. KEADAAN UMUM LOKASI

A. Letak dan Luas Desa.....	13
B. Jenis Tanah dan Topografi.....	13
C. Iklim.....	14
D. Jumlah Penduduk dan Matapecaharian.....	17
E. Peruntukan Lahan.....	19
F. Kelembagaan Masyarakat.....	19
G. Potensi Sumber Daya Alam.....	20
H. Potensi Sumber Daya Manusia.....	21
I. Sarana dan Prasarana .....	22

#### V. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Karakteristik Responden

1. Umur.....	24
2. Tingkat Pendidikan.....	25
3. Tanggungan Keluarga.....	26
4. Luas Lahan.....	27

##### B. Pengembangan HR di Desa Mangempang

1. Ketersediaan Lahan.....	27
2. Syarat Peserta / Kelompok.....	29
3. Komoditi Yang Dapat Dikembangkan.....	30
4. Modal Masyarakat.....	31
5. Aksesibilitas.....	31
6. Pola Pembangunan Hutan.....	32
7. Pelayanan Pemerintah.....	33

#### VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	35
B. Saran.....	35

#### DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Luas Areal Dusun Desa Mangempang.....	12
2. Data Curah Hujan Selama 10 Tahun Terakhir (1997-2006) di Desa Mangempang.....	15
3. Jumlah Bulan Basah dan Bulan Kering Selama 10 Tahun Terakhir di Desa Mangempang.....	16
4. Klasifikasi Ikim Menurut Schmidt dan Fergusson.....	17
5. Pembagian Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	18
6. Peruntukan Lahan di Desa Manmgempang.....	19
7. Kelembagaan di Desa Mangempang.....	19
8. Luas Areal Penanaman Menurut Komoditas.....	20
9. Kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan.....	20
10. Jenis Komoditas Buah-Buahan Yang Dibudidayakan.....	21
11. Jenis Komoditas Tanaman Perkebunan Yang Dibudidayakan.....	21
12. Keadaan Penduduk Meneurut Tingkat Pendidikan.....	22
13. Sarana dan Prasarana di Desa Mangempang.....	23
14. Klasifikasi Responden Menurut Umur di Desa Mangempang.....	24
15. Klasifikasi Responden Berdasarkan Kategori Pendidikan di Desa Mangempang.....	25
16. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga.....	26
17. Klasifikasi Responden Berdasarkan Luas Lahan di Desa Mangempang.....	27
18. Pengembangan HR di Desa Mangempang.....	27

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang



Laju kerusakan hutan yang disebabkan oleh perambahan hutan, penebangan liar, penyelundupan kayu dan kegiatan lainnya mencapai angka sebesar 3,8 juta hektar pertahun. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan data kerusakan hutan tiga tahun sebelumnya yang mencapai 1,8 juta hektar atau sebelum krisis ekonomi 1997 yang mencapai 800.000 - 900.000 hektar pertahun. Kerusakan hutan tersebut tidak hanya berada di hutan produksi saja tetapi juga hutan lindung, kawasan konservasi maupun kawasan perlindungan lainnya (Didik, 1998).

Kerusakan lahan juga terjadi di luar kawasan hutan. Akibatnya, akumulasi kerusakan hutan dan lahan yang terjadi selama ini baik di dalam dan di luar kawasan hutan, mencapai 101,73 juta hektar. Seluas 59,63 juta hektar diantaranya terjadi di dalam kawasan hutan. Dengan banyaknya kawasan lahan kritis dan tanah kosong, hutan alam tidak bisa lagi menjadi tumpuan utama untuk memproduksi kayu bagi semua kebutuhan industri kehutanan (Helmi, 2006).

Tingkat degradasi itu telah menunjukkan hutan alam tidak mampu sepenuhnya mengiringi peningkatan kebutuhan produk-produk hasil hutan. Sehingga posisi lahan kritis dan tanah kosong yang berada di kawasan hutan alam ditempatkan pada kondisi untuk direhabilitasi. Sebaliknya, kawasan hutan alam produksi yang tersisa bila akan dilakukan pemanfaatan harus dilakukan dengan sangat ketat. Implementasi kegiatan sektor kehutanan harus memperhatikan aspek kelestarian hutan.

Menanggapi masalah tersebut, harus mempertimbangkan akan adanya masyarakat disekitar dan di dalam hutan. Masyarakat disekitar dan di dalam hutan pada umumnya merupakan masyarakat yang tertinggal, kondisi sosial ekonomi golongan masyarakat ini masih sangat rendah. Hal ini salah satunya disebabkan adanya pengabaian kepentingan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan hutan. Sehingga pada akhirnya timbul kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap

pelaksanaan pembangunan kehutanan. Selama ini upaya untuk mensejahterahkan masyarakat setempat belum berhasil dan belum secara tepat mengakomodasikan kepentingan sosial budaya dan ekonomi.

Keberadaan hutan ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti pentingnya hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan rakyat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibolehkan mengubah fungsi utamanya.

Perkembangan pembangunan kehutanan menuntut untuk memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan Hutan Rakyat, hal ini berkaitan dengan semakin kurangnya hasil kayu dari kawasan hutan negara, baik hasil kayu sebagai kayu pertukangan, kayu industri, maupun kayu bakar. Selain itu pembangunan hutan rakyat juga berfungsi untuk menanggulangi lahan kritis, konservasi lahan, perlindungan hutan, juga sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan dengan memperdayakan masyarakat setempat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penyelenggaraan kehutanan dengan memperhatikan aspirasi dan mengikutsertakan masyarakat telah menjadi landasan yang utama. Bahkan pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna (Pasal 70 UU Kehutanan No. 41 tahun 1999). Bentuk peranan masyarakat dalam bidang kehutanan yang harus didorong oleh pemerintah salah satunya adalah pembangunan hutan rakyat.

## **B. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengembangan Hutan tanaman rakyat di Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam implementasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan rakyat.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hutan dan Kehutanan

Menurut Undang-undang No. 41 tahun 1999 pasal 1 ayat 2, tentang ketentuan pokok kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan negara adalah hutan yang tidak dibebani hak atas tanah (Departemen Kehutanan, 1999).

Ahli silvikultur mempunyai pandangan berbeda dengan ahli manajemen hutan atau ahli ekologi atau ilmu-ilmu lainnya. Menurut ahli silvika, hutan merupakan suatu asosiasi dari tumbuh-tumbuhan yang sebagian besar terdiri dari pohon-pohon atau vegetasi berkayu yang menempati areal luas. Sedangkan ahli ekologi mengartikan hutan sebagai suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohon dan mempunyai keadaan lapang yang berbeda dengan keadaan diluarnya (Arief, 2005).

Kehutanan dapat disebut sebagai ilmu, seni, profesi, serta praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan yang berhubungan dengan lahan-lahan hutan agar dapat bermanfaat bagi manusia dimasa kini dan yang akan datang. Sumber daya tersebut tidak hanya terbatas pada pohon-pohon tetapi juga termasuk tumbuhan-tumbuhan lain, semua binatang termasuk margasatwa, iklim, tanah, serta udara dan air yang berhubungan dengan hutan tersebut (Junus, 1984).

### B. Kebijakan Kehutanan

Faktor yang dianggap paling penting untuk mewujudkan peningkatan kinerja penyelenggaraan kehutanan adalah dikuatkannya peran kelembagaan pengelolaan hutan yang mampu mengidentifikasi permasalahan spesifik wilayah tertentu. Dengan demikian lembaga-lembaga ini mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi keterbatasan daya dukung hutan maupun aspirasi yang



berkembang dalam masyarakat. Pengelolaan hutan ditingkat masyarakat inilah yang seharusnya merumuskan kebijakan pengelolaan hutan dan usaha hasil hutan. Apabila substansi kebijakan pengelolaan hutan dirumuskan dipusat dengan tanpa mengaitkannya dengan kondisi riil di wilayah, maka hasil maksimalnya akan tetap mengandung kelemahan (Ida, 2003).

Kebijakan dalam latar penelitian kebijakan diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah sosial. Pemecahan masalah sosial oleh *policy maker* dalam hal ini dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dibuat oleh *policy research* berdasarkan hasil penelitiannya. Kebijakan disini tidak dipersepsi dari sudut pandang politik pemerintah, melainkan kebijakan sebagai objek studi (Danim, 2000).

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya dapat diterapkan, selain itu pemerintah belum mempercayai masyarakat, juga adanya kenyataan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pencurian kayu. Masalah ini sebaiknya dicari akar permasalahannya, agar kebijakan yang diambil tidak kontra produktif. Apabila pengelolaan hutan berbasis masyarakat menjadi satu pilihan kebijakan menuju pengelolaan hutan yang lestari, maka pemerintah berkewajiban memfasilitasi masyarakat agar lebih berdaya dalam menjaga, memelihara dan memanfaatkan hutan (Helmi, 2006).

### **C. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat**

Kegiatan pembangunan ekonomi bukan tanpa resiko. Teori ekonomi neoklasik yang menekankan pada peranan pasar menjadi penopang praktek – praktek pembangunan. Sumber daya alam akan diperhitungkan jika dapat diperdagangkan pada pasar. Implikasi dari teori ini adalah sumber daya seperti udara dan air bersih, dan fungsi ekosistem dianggap barang-barang bebas. Implikasi lebih jauh adalah mengutamakan aktor-aktor tertentu untuk menggerakkan produksi dan perdagangan, dan mengabaikan masyarakat banyak sebagai aktor pembangunan. Permasalahan yang muncul sebagai akibat aktivitas pembangunan antara lain

deforestasi dan degradasi lingkungan hidup (pencemaran udara, fluktuasi, banjir dan kekeringan), kekurangan persediaan kayu bakar di pedesaan, kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi dan politik. Permasalahan tersebut mengundang perhatian para ilmuwan dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kependudukan, pangan, pertanian dan kehutanan (Didik, 1998).

Dalam mencari jawaban sejauh mana peluang-peluang terbuka dalam mempertahankan sumber daya hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu, pendekatan tulisan ini berangkat dari temuan produktifitas hutan Indonesia dari keseluruhan hutannya yang diperkirakan FAO luasnya 121 juta hektar yang kawasan produksinya tidak boleh melampaui 60% atau 72600 juta hektar. Karena 60% hutan seyogianya dilestarikan untuk tujuan-tujuan perlindungan dan keanekaragaman jenis. Tingkat konsumsi kayu Indonesia saat itu adalah 0.71 m<sup>3</sup> seorang setahun. Sehingga untuk memenuhinya dalam setahun sekurang-kurangnya harus disediakan kayu sebanyak 142 juta m<sup>3</sup> (Sambas, 2003).

#### **D. Hutan Tanaman Rakyat**

Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (*PP 6 tahun 2007*). Ketentuan umum di dalam peraturan ini memberikan batasan yang tegas tentang HTR, sehingga khalayak bisa memahami perbedaan antara HTR dengan hutan kemasyarakatan (HKM) dan hutan rakyat (HR). HKM memungkinkan dikembangkan di hutan konservasi (kecuali cagar alam dan zona inti Taman Nasional), Kawasan hutan produksi, dan hutan lindung. Sedangkan Hutan rakyat jelas-jelas dibangun di luar kawasan hutan negara atau berada pada hutan hak (hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah) (Emila, 2007).



Pada tanggal 21 Februari 2007 melalui Seminar Nasional dan Semiloka Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Menteri Kehutanan mengatakan, selama ini pihaknya selalu memberikan izin konsesi perusahaan hutan kepada pengusaha saja tidak kepada masyarakat. Sekarang kebijakan Dephut dalam pengelolaan hutan sudah berubah. Masyarakat diperbolehkan melakukan usaha dalam perusahaan kehutanan khususnya HTR, "bila perlu jangka waktu konsesi yang diberikan kepada masyarakat selama 100 tahun, " ujar Kaban selaku Menteri kehutanan. Menurut Menteri Kehutanan, dalam kebijakan HTR sebagai landasan hukumnya adalah peraturan pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2007 tentang HTR yang isinya antara lain pertama. Membuat akses ke legalisasi (Hukum) untuk alokasi areal, dan pemberian IUPHHK-HTR perorangan atau koperasi. Kedua, membuka akses kelembagaan keuangan sesuai dengan pasal 40 ayat 6 dan peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan No. 06.1/PMK.01/2007 dan 02/MENHUT-II/2007 tentang penggunaan dana reboisasi (DR) untuk PPK- BLU badan pembiayaan kehutanan (BP2H). Ketiga, membuka akses ke pasar harga dasar penjualan kayu HTR dan eksport hasil hutan tanaman (Marion, 2007).

Menurut Departemen Kehutanan (2007), Hutan Tanaman Rakyat memiliki 3 pola pengembangan antara lain :

1. HTR Pola Mandiri, Masyarakat setempat membentuk kelompok diajukan ke Bupati, pemerintah mengalokasikan areal dan SK IUPHHK-HTR untuk setiap individu dalam kelompok dan masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan HTR, pengajuan dan pengembalian kredit, pasar, dan pendampingan dari pemerintah / Pemda. Setiap anggota mengingatkan anggota kelompok lainnya untuk memenuhi kewajiban.
2. HTR pola kemitraan dengan HTI BUMN/S, atau industri perindustrian (*Panel*), Pulp dan kertas / model plasma inti masyarakat setempat membentuk kelompok diajukan oleh Bupati ke Menhut. Pemerintah menerbitkan SK IUPHHK-HTR ke individu dan menetapkan mitra. Mitra bertanggung jawab atas saprodi, pelatihan, pendampingan dan pasar.

3. HTR pola *developer*, BUMN/S sebagai *developer* membangun hutan tanaman rakyat dan selanjutnya diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pemegang IUPHHK-HTR yang selanjutnya biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai pinjaman pemegang IUPHHK- HTR dan dikembalikan secara bertahap sesuai akad kredit.

#### **E. Hutan Rakyat**

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0.25 Ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%. Produksi utama hutan rakyat adalah hasil berupa kayu-kayuan, baik kayu pertukangan, kayu industri, kayu serat, maupun kayu energi. Sedangkan hasil sampingan hutan rakyat dapat diperoleh sebelum hasil utama berupa kayu dipanen. Hasil sampingan tersebut dapat berupa getah, nira, buah dan sebagainya. Disela-sela tanaman pokok kayu apabila dimungkinkan dapat ditanam jenis lain yang menghasilkan produksi panen musiman (tanaman pangan dan tanaman obat-obatan). Sehingga dapat dicapai optimalisasi hasil bagi areal yang bersangkutan dan selanjutnya akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang mengusahakan (Supriadi, 2002).

Menurut Junus, dkk (1984), hutan rakyat memiliki ciri-ciri khas sebagai berikut :

1. Tidak merupakan suatu kawasan yang kompak tetapi terpencar-pencar.
2. Kelangsungan hutan rakyat sangat tergantung pada bahan baku untuk keperluan pemukiman dan usaha tani diluar kehutanan seperti ; penghijauan, pemeliharaan, dan pemungutan hasil.
3. Bentuk usaha tani tidak terlalu murni berupa usaha bercocok tanam pohon-pohonan ada kalannya terpadu atau dikombinasikan dengan cabang-cabang usaha tani lainnya (Usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dll) yang sering disebut agrokehutanan

Menurut Departemen Kehutanan (1996), Manfaat hutan rakyat adalah

1. Untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
2. Memanfaatkan secara maksimal dan lestari lahan yang tidak produktif dan pengelolaannya agar menjadi lahan yang subur sehingga akan lebih baik untuk usaha tanaman pangan.
3. Meningkatkan produksi kayu perkakas, bahan bangunan, dan alat rumah.
4. Untuk penyediaan bahan baku industri pengolahan yang memerlukan bahan baku kayu, Seperti ; pabrik kertas, korek api dan lain-lain.
5. Menambah lapangan kerja bagi penduduk di pedesaan.
6. Membantu mempercepat usaha rehabilitasi lahan kritis dan mewujudkan terbinanya lingkungan hidup sehat dan kelestarian sumber daya alam.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2007 sampai pada bulan Maret 2008 di Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.

#### **B. Alat dan Bahan**

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah alat tulis menulis, quisioner, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

#### **C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey dan studi pustaka. Berdasarkan data yang dikumpulkan dibedakan atas 2 :

##### **1. Data Primer**

Data primer dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam terhadap stakeholder-stakeholder terkait.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder dikumpulkan melalui pengumpulan kebijakan-kebijakan yang terkait, data-data dari instansi terkait, dan melalui studi pustaka.

#### **D. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian ini berupa kajian aturan mengenai :

##### **1. Syarat peserta / Masyarakat**

Pembangunan Hutan Rakyat dilakukan perseorangan atau dalam bentuk kelompok oleh masyarakat lokal / masyarakat adat di lahan-lahan milik atau lahan yang dibebani hak.



## 2. Lahan

Areal hutan rakyat berada pada lahan milik atau lahan yang dibebani hak dengan luasan minimum 0.25 Ha dengan penutupan tajuk didominasi oleh tanaman perkebunan lebih dari 50%.

## 3. Komoditi atau Tanaman

Komoditi atau tanaman untuk Hutan Rakyat adalah dari jenis yang cepat tumbuh 7 tahunan sebagai tabungan dan tanaman kehidupan yang sesuai lahannya dan dekat dengan industri perkebunan untuk menekan biaya transportasi. Komoditi atau tanaman tersebut dapat berupa tanaman sejenis atau tanaman berbagai jenis.

## 4. Instansi terkait

Instansi atau lembaga terkait yang berperan dalam HR baik dari perencanaan, pendanaan sampai pada pemasaran hasil.

### **E. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan. Tahapan pertama adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian tersebut (*Analisis Dokumen*) dan tahapan kedua, berdasarkan hasil analisis dokumen tersebut dilakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang timbul di lapangan (*Analisis Implementasi*).

### **F. Konsep Operasional**

1. Kelompok adalah kumpulan individu dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi, dan kepentingan untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.
2. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan sebagai kesatuan komunitas sosial yang pada mata pencaharian utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan.
3. Perorangan adalah warga negara Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.

4. Stakeholder adalah pihak yang memahami tentang suatu bidang terkait.
5. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
6. Implementasi adalah penerapan dari suatu kebijaksanaan.
7. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya, dan sebagainya.
8. Analisis Dokumen adalah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan suatu objek yang akan diamati.
9. Analisis Implementasi adalah melakukan penyelidikan dengan mengidentifikasi permasalahan - permasalahan yang timbul di lapangan berdasarkan acuan dari analisis dokumen.
10. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0.25 Ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%.
11. Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
12. Umur responden adalah jangka waktu mulai dari tahun kelahiran responden sampai pada penelitian dilakukan.
13. Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh responden yang dinyatakan dalam satuan tahun.
14. Jumlah tanggungan keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah dengan responden atau berada diluar rumah dan menjadi tanggung jawab responden.



## IV. KEADAAN UMUM LOKASI

### A. Letak dan Luas Desa

Desa mangempang terbentuk pada tahun 2003 yang merupakan pemekaran dari Desa Bontomanai.

Secara administratif, Desa Mangempang terletak di kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tassese
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buakkang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bontomanai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pattalikang.

Desa mangempag berjarak  $\pm$  42 Km sebelah utara sungguminasa dengan waktu tempuh  $\pm$  1.5 jam menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat. Jarak dari ibukota Propinsi, Makassar yaitu  $\pm$  67 Km dengan waktu tempuh 120 menit. Luas Desa Mangempang  $\pm$  1178,40 Ha. Desa ini terbagi atas empat dusun yaitu dusun mangempang, dusun kampung beru, dusun bangkeng batu, dan dusun datara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Luas Areal Dusun Desa Mangempang

No	Nama Dusun	Luas Areal (Ha)
1.	Mangempang	1115,8
2.	Kampung Beru	10
3.	Bangkeng Batu	2,6
4.	Datara	50
	<b>Total</b>	<b>1178,40</b>

Sumber : Kantor Desa Mangempang, 2007

### B. Jenis Tanah dan Topografi

Keadaan topografi di Desa Mangempang pada umumnya bergelombang hingga berbukit dan berada pada ketinggian 700 – 1500 m dpl. Berdasarkan tinjauan peta tanah Kabupaten Gowa, Jenis tanah di Desa Mangempang adalah latosol coklat kekuningan, struktur tanah gumpalan, tekstur tanah liat dan kedalam efektif



tanah 30 – 60 cm. Bahan induknya terdiri dari vulkana masam sampai intermediate. Tubuh tanah dalam lapisan atas berwarna coklat tua, tekstur liat sampai berdebu, struktur remah sampai gembur. Lapisan bawah berwarna coklat tua kekuningan, tekstur liat, remah dan gembur.

### C. Iklm

Umumnya tipe iklim yang digunakan di Indonesia didasarkan pada klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Fergusson dengan membandingkan rata-rata jumlah bulan kering, bulan lembab dan bulan basah pada kurun waktu 10 tahun yang berawal dari tahun pertama dari ke sepuluh tahun terakhir. Tipe iklim yang terdapat pada Desa Mangempang dapat ditentukan dengan nilai Q ratio dengan menggunakan rumus :

$$Q = \frac{\text{Rata-Rata Bulan Kering}}{\text{Rata-Rata Bulan Basah}} \times 100\%$$

Selanjutnya Mohr membagi 3 bulan berdasarkan dari parameter derajat kebasahan dan kekeringan setiap bulannya yaitu :

- a. Bulan basah (bb) jika curah hujan setiap bulannya > 100 mm.
- b. Bulan lembab (bl) jika curah hujan setiap bulannya antara 60 mm – 100 mm.
- c. Bulan kering (bk) jika curah hujannya < 60 mm.

Data curah hujan rata-rata yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi Kelas I Kabupaten Maros selama 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2006, dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Data Curah Hujan Selama 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir (1997 - 2006) di Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, kabupaten Gowa.

Bulan	Tahun									
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Januari	948	871	1028	416	1081	489	456	489	470	710
Februari	465	742	1244	366	969	508	1227	663	197	617
Maret	619	481	937	573	843	364	383	589	426	417
April	643	351	473	420	431	279	225	79	210	402
Mei	169	119	23	143	43	222	59	159	27	103
Juni	429	59	20	133	54	303	137	26	35	155
Juli	62	127	68	221	69	109	31	x	17	0
Agustus	7	0	0	141	0	33	0	x	x	0
September	41	0	0	82	102	16	4	6	x	0
Oktober	120	x	x	181	334	222	100	12	176	x
November	986	x	x	270	383	237	212	179	180	46
Desember	110	x	x	117	819	635	686	489	434	403

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Panakukang Maros

Keterangan : x = tidak ada data / alat rusak

Penentuan tipe iklim di Indonesia umumnya didasarkan pada klasifikasi Schmid dan Fergusson dengan berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering. menurut Mohr dalam Kartasapoeyra (2004) bulan basah adalah bulan yang curah hujannya melebihi 100 mm, dan bulan kering adalah bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm, sedangkan antara bulan basah dan bulan kering disebut bulan lembab.

Adapun rata-rata bulan basah dan bulan kering selama 10 tahun terakhir di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3. Jumlah Bulan Basah dan Bulan Kering selama 10 Tahun Terakhir di Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.

Tahun	Bulan Basah	Bulan Kering
1997	10	2
1998	6	3
1999	5	4
2000	12	0
2001	9	3
2002	10	2
2003	8	4
2004	7	3
2005	7	3
2006	7	4
<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>28</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>8,1</b>	<b>2,8</b>

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Panakukang Maros

Untuk mengetahui tipe iklim pada lokasi penelitian, digunakan nilai Q ratio yaitu perbandingan rata-rata jumlah bulan kering dan rata-rata jumlah bulan basah.

Adapun perbandingan nilai q ratio sebagai berikut :

$$Q \text{ ratio} = \frac{\text{Rata-rata bulan kering}}{\text{rata-rata bulan basah}} \times 100\%$$

$$= \frac{2,8}{8,1} \times 100\%$$

$$= 34,56\%$$

Berdasarkan penggolongan iklim dari Schmidt dan fergusson, maka tipe iklim di Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa termasuk dalam tipe iklim C dengan nilai Q ratio sebesar 34,56% dengan kriteria agak basah. Menurut Indriani (1996) jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik pada tipe iklim C

dengan jenis tanah latosol yaitu palawija dan tanaman kertas. Klasifikasi tipe iklim menurut Schmidt dan Fergusson dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4. Klasifikasi Iklim Menurut Schmidt dan Fergusson

Tipe Iklim	Q Ratio	Kriteria
A	0 - 14,3	Sangat Basah
B	14,3 - 33,3	Basah
C	33,3 - 60,0	Agak Basah
D	60,0 - 100,0	Sedang
E	100,0 - 167,0	Agak kering
F	167,0 - 300,0	Kering
G	300,0 - 700,0	Sangat Kering
H	>700,0	Luar Biasa Kering

#### D. Jumlah penduduk dan mata pencaharian

Berdasarkan hasil pendataan penduduk sampai dengan januari 2007 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Mangempang adalah 2002 jiwa yang terdiri dari laki-laki 979 jiwa atau 48,90% dan perempuan 1023 jiwa atau 51,10% atau 508 KK. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki, sehingga dapat dikatakan bahwa Desa Mangempang memiliki potensi tenaga kerja yang cukup besar, dimana penduduk usia kerja (19 - 45 tahun) sebanyak 1.075 jiwa atau 53,69% dari total jumlah penduduk.

Dari data tersebut, keadaan penduduk dapat dirinci berdasarkan pekerjaannya sebagaimana disajikan pada tabel 5 :

Tabel 5. Pembagian Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Buruh Tani	50
2	Petani	1.513
3	Pedagang/Wiraswasta/Pengusaha	25
4	Pengrajin	15
5	PNS	5
6	TNI/Polri	3
7	Penjahit	2
8	Montir	1
9	Supir	12
10	Tukang Kayu	8
11	Tukang Batu	15
12	Guru Swasta	10
13	Lain-lain	343
	<b>Total</b>	<b>2002</b>

Sumber : Kantor Desa Mangempang, 2007

Dari jumlah tersebut, penduduk dengan mata pencaharian bertani adalah 1.563 jiwa atau 78,07%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat usaha tani di Desa Mangempang cukup tinggi, sehingga berimplikasi kepada kondisi kawasan hujan.

### E. Peruntukan Lahan

Lahan yang ada pada Desa Mangempang diperuntukkan dalam berbagai keperluan, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Peruntukkan Lahan di Desa Mangempang

No	Peruntukan Lahan	Luas (Ha)
1	Lahan Sawah	353
2	Tegal / Ladang	405
3	Pemukiman	15,90
4	Lapangan	2,50
5	Perkantoran pemerintah	2,00
6	Hutan Lindung	-
7	Hutan Produksi	-
8	Tanah Perkebunan Rakyat	225
9	Tanah Perkebunan Negara	275
	<b>Total</b>	<b>1178,40</b>

Sumber : Kantor Desa Mangempang, 2007

### F. Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan masyarakat yang terdapat di Desa Mangempang terdiri dari kelompok tani, karang taruna, PKK, kelompok gotong royong, LKMD dan kelompok remaja mesjid. Untuk melihat secara rinci kelembagaan di Desa Mangempang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Kelembagaan di Desa Mangempang

No	Lembaga Masyarakat	Jumlah
1	Kelompok Tani	4
2	PKK	1
3	Karang Taruna	1
4	LKMD	1
5	Kelompok Gotong Royong	4
6	Ikatan Remaja Mesjid	6
	<b>Total</b>	<b>17</b>

Sumber : Kantor Desa Mangempang, 2007



### G. Potensi Sumber Daya Alam

Desa Mangempang dengan luasan daerah 9.126 Ha memiliki tipologi desa sekitar hutan yang terbagi atas empat dusun dan memiliki sumberdaya alam yang sangat melimpah. Dari segi pertanian dan perkebunan masyarakat memanfaatkan lahan dengan menanam jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan cabe untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk diperdagangkan. Adapun pembagian luas areal penanaman menurut komoditas diatas adalah sebagai berikut

Tabel 8. Luas Areal Penanaman Menurut Komoditas

No	Jenis Komoditi	Luas Lahan
1	Jagung	228
2	Kacang Tanah	34
3	Ubi Kayu	134
4	Cabe	2,00
	<b>Total</b>	<b>398</b>

Sumber : Kantor Desa Mangempang, 2007

Kepemilikan lahan pertanian di Desa Mangempang dibagi berdasarkan 4 kelompok rumah tangga yaitu rumah tangga tidak memiliki lahan pertanian, rumah tangga yang memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha, rumah tangga yang memiliki lahan pertanian dengan luasan 0,5-1,0 Ha, dan rumah tangga yang memiliki lahan pertanian dengan luasan lebih dari 1,0 Ha. Adapun variasi jumlah rumah tangga berdasarkan kepemilikan lahan pertanian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

No	Kepemilikan Lahan Pertanian	Jumlah Rumah Tangga
1	Tidak memiliki	5
2	Memiliki Kurang 0,5 Ha	65
3	Memiliki 0,5 – 1,0 Ha	328
4	Memiliki Lebih dari 1,0 Ha	110
	<b>Total</b>	<b>508</b>

Sumber : Kantor Desa Mangempang, 2007



Masyarakat Mangempang memiliki beberapa jenis komoditas buah-buahan. jenis buah-buahan yang dibudidayakan di Desa Mangempang berupa mangga, rambutan dan pisang. Hasil dari komoditas buah-buahan yang dibudidayakan tersebut diperdagangkan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10. Jenis Komoditas Buah-Buahan yang Dibudidayakan

No	Jenis Komoditas Buah-buahan	Luas Lahan (Ha)
1	Mangga	
2	Rambutan	3,50
3	Pisang	2,25
	<b>Total</b>	15,50
		<b>21,25</b>

Sumber : Kantor Desa Mangempang, 2007

Masyarakat Mangempang tidak hanya memiliki jenis komoditas buah-buahan saja tetapi juga memiliki jenis komoditas tanaman perkebunan. Komoditas tanaman perkebunan yang dapat dibudidayakan di Desa Mangempang berupa kelapa, kopi, coklat dan lada. Luasan untuk jenis komoditas tanaman perkebunan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Jenis Komoditas Tanaman Perkebunan yang Dibudidayakan

No	Jenis Komoditas Tanaman Perkebunan	Luas Lahan (Ha)
1	Kelapa	3,25
2	Kopi	5,00
3	Coklat	50,00
4	Lada	2,00
	<b>Total</b>	60,25

Sumber : Kantor Desa Mangempang, 2007

#### H. Potensi Sumber Daya Manusia

Desa Mangempang dengan jumlah penduduk sebanyak  $\pm$  2.002 jiwa dengan 508 kepala keluarga, dimana laki-laki berjumlah 979 jiwa dan perempuan berjumlah 1.023 jiwa. Sehingga jika penduduknya diberdayakan dapat meningkatkan pembangunan desa. Akan tetapi jumlah penduduk yang banyak ini tidak seimbang dengan mutu pendidikan yang diperoleh. Masyarakat di Desa Mangempang rata-rata

belum menerima pendidikan yang cukup dimana masyarakat yang ada dipelosok-  
 pelosok desa belum menerima pendidikan secara layak. Jumlah tenaga pengajar  
 dalam berbagai institusi pendidikan yang ada di Desa Mangempang masih sangat  
 sedikit jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang ingin memperoleh  
 pendidikan. Akibat pendidikan yang diperoleh masyarakat masih minim  
 menyebabkan pembangunan di dalam daerah sangat lambat, dan kurangnya tenaga  
 ahli dalam instansi pemerintah yang terkait dalam memberikan informasi dan data-  
 data yang cukup penting untuk mendukung proses pembangunan. Dengan tingkat  
 pendidikan yang masih kurang menyebabkan kecenderungan masyarakat  
 bermatapencaharian sebagai petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel  
 sebagai berikut :

Tabel 12. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tidak tamat SD/Sederajat	220
2	Tamat SD/Sederajat	168
3	Tamat SLTP/Sederajat	25
4	Tamat SLTA/Sederajat	58
5	Tamat D-1	5
6	Tamat D-2	1
7	Tamat S-1	2
	<b>Total</b>	<b>479</b>

Sumber : Kantor Desa Mangempang, 2007

### I. Sarana dan Prasarana

Desa Mangempang memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai  
 dimana dapat dijangkau dengan kendaraan darat. Jalannya merupakan jalan poros  
 kecamatan yang sudah beraspal terkecuali jalan yang menghubungkan antar dusun  
 Datara dengan dusun-dusun yang lainnya. Dari segi penerangan sudah baik karena  
 semua dusun menggunakan listrik. Selain itu, terdapat pula prasarana pemerintah  
 berupa kantor desa, prasarana peribadatan yaitu masjid sebanyak 6 bangunan,  
 Prasarana kesehatan berupa Puskesmas dan prasarana pendidikan formal maupun non  
 formal. Untuk pendidikan formal berupa sekolah dasar (SD) sebanyak 2 bangunan

dan paket B (Setara SMP) sebanyak 2 bangunan. Sedangkan untuk pendidikan non formal berupa Sekolah Pendidikan Anak Saleh (SPAS) dan Taman Bermain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 13. Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Mangempang

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Bentuk
1	Prasarana Transportasi Darat	Jalan beraspal
2	Sarana Transortasi	Truk Umum, Angkutan Pedesaan dan Ojek
3	Prasarana Komunikasi	Wartel, Radio dan TV
4	Prasarana Air Bersih	Air Pipa / Selang
5	Sarana pemerintah	Kendaraan Dinas, Puskesmas
6	Prasarana pemerintah	Kantor Desa
7	Prasarana Pendidikan	SD/Sederajat, Paket B (Setara SMP), Sekolah Pendidikan Anak Saleh (SPAS) dan Taman Bermain
8	Prasarana Penerangan	Listrik PLN, Listrik Tenaga Surya
9	Prasarana Ibadah	Mesjid

Sumber : Kantor Desa Mangempang, 2007

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN



### A. Karakteristik Responden

#### 1. *Umur*

Umur merupakan salah satu identitas yang dapat mempengaruhi kemampuan kerja dan pola pikir. Responden yang berumur muda pada umumnya mempunyai kemampuan fisik yang lebih baik dalam bekerja mencari nafkah dan lebih cepat menerima hal-hal yang berbeda bagi perkembangan hidupnya pada masa yang akan datang. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan adanya variasi umur responden mulai dari umur termuda yaitu 25 tahun hingga umur tertua yaitu 59 tahun. Responden tersebut merupakan kepala keluarga yang mendiami sekitar kawasan hutan di Desa Mangempang. Penggolongan umur dibagi dalam 3 kategori berdasarkan umur produktif dan non produktif, penggolongan umur 15 – 34 tahun dikategorikan usia produktif muda, umur 35 – 54 tahun dikategorikan usia produktif tua dan di atas umur 55 tahun dikatakan usia non produktif untuk lebih jelasnya katagorikan pembagian umur responden dapat dilihat pada tabel 14 berikut :

Tabel. 14 Klasifikasi Responden Menurut Umur di Desa Mangempang.

No	Kategori	Umur Responden (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	Usia Produktif Muda	15 - 34	8	40%
2	Usia Produktif Tua	35 - 54	8	40%
3	Usia Non Produktif	>55	4	20%
		Jumlah	20	100%

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2008.

Tabel 14, menunjukkan bahwa jumlah responden pada usia produktif muda berjumlah 8 orang (40%), Usia Produktif tua sebanyak 8 orang (40%), dan usia non produktif sebanyak 4 orang (20%). Dengan banyaknya responden berusia produktif maka kemungkinan kegiatan pengelolaan hutan dapat berjalan dengan baik.



## 2. *Tingkat Pendidikan*

Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi kemampuan berfikir, memahami arti pentingnya hutan, serta mencari solusi dari masalah – masalah yang ada. Seseorang akan lebih cepat memberikan tanggapan terhadap suatu masalah melalui kemampuan berfikir dengan bekal pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki.

Tingkat pendidikan responden di Desa Mangempang diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu kategori rendah jika tidak sekolah dan sekolah sampai SD, Kategori menengah jika sekolah sampai SMP dan SMA dan kategori tinggi jika pendidikannya sampai Akademi/perguruan tinggi. Penggolongan kategori pendidikan responden dapat dilihat pada tabel. 15

Tabel. 15, Klasifikasi responden berdasarkan kategori pendidikan di Desa Mangempang

No	Tingkat pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah – SD	11	55%
2	SMP – SMA	7	35%
3	Akademi/Perguruan tinggi	2	10%
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2008.

Tabel.15, menunjukkan bahwa responden yang tidak sekolah dan tamat SD menempati urutan tertinggi yaitu 11 orang atau 55% dari total responden, Sedangkan 7 orang atau 35% dari total responden tingkat pendidikannya sampai SMP/SMA dan responden yang tingkat pendidikannya sampai Perguruan Tinggi/Akademi hanya 2 orang atau 10% dari total responden. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di lokasi penelitian masih sangat rendah. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut disebabkan pada umumnya responden tidak mempunyai biaya untuk sekolah, dan melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, munculnya prinsip yang ada dimasyarakat pada umumnya, bahwa mempunyai pendidikan tinggi belum memberikan jaminan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Prinsip tersebut mengakibatkan banyak petani menganggap bahwa pendidikan di sekolah dasar sudah



cukup untuk mencari nafkah hidup. Selain itu masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa tanpa pendidikan masyarakat dapat mengelola lahannya dengan baik. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tingkat pengetahuan mengenai hutan rakyat rendah dan menyebabkan masyarakat tidak mengetahui prosedur yang ada dalam mengelola hutan.

### 3. Tanggungan Keluarga

Besarnya jumlah tanggungan keluarga akan mempengaruhi biaya hidup yang akan dikeluarkan setiap tahun. Dengan demikian responden yang memiliki tanggungan keluarga yang cukup banyak akan membutuhkan biaya hidup yang besar pula. Kebutuhan hidup yang besar akan mendorong untuk lebih giat berusaha untuk menambah pendapatannya. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah tanggungan keluarga responden yang terbanyak adalah 6 (Enam) orang dan yang paling sedikit adalah 1 (Satu) orang tanggungan. Untuk jelasnya mengenai jumlah tanggungan keluarga responden dapat dilihat pada tabel. 16.

Tabel. 16, Klasifikasi responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga

No	Tanggungan Keluarga	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	0 – 2 orang	7	35%
2	3 – 5 orang	9	45%
3	≥ 6 orang	4	20%
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2008.

Tabel.16, menunjukkan bahwa responden yang memiliki tanggungan keluarga 3 – 5 orang memiliki nilai tertinggi yaitu 9 orang (45%) dibandingkan responden yang memiliki tanggungan 0 – 2 orang yaitu sebanyak 7 orang (35%) dan responden yang memiliki tanggungan keluarga lebih dari 5 orang yaitu 4 orang (20%). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga responden di Desa Mangempang masih dikategorikan sedang. Jumlah tanggungan responden mempengaruhi besarnya kebutuhan biaya. Jumlah tanggungan keluarga yang besar dapat menjadi sumber persediaan tenaga kerja keluarga. Tetapi disisi lain dapat berpengaruh terhadap



tingginya biaya hidup yang harus ditanggung oleh kepala keluarga. Hal ini semakin mendorong responden untuk lebih aktif berusaha guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

#### 4. Luas Lahan

Luas lahan yang dimiliki oleh responden baik dalam bentuk Sawah, Ladang, maupun pemukiman ditotalkan serta dikelompokkan dalam kategori lahan sempit dan lahan luas. Lahan tersebut digunakan masyarakat sempit untuk dikelola sebagai sawah dan kebun dengan menanam jenis pertanian pada lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Kategori lahan sempit adalah dibawah 1 Ha. Untuk lebih jelasnya klasifikasi petani responden berdasarkan luas lahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.17 Klasifikasi Responden Berdasarkan Luas Lahan Di Desa Mangempang

No	Kategori Luas Lahan	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Sempit	<1	7	35%
2	Luas	>1	13	65%
Jumlah			20	100%

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2008.

Pada tabel 17 terlihat bahwa jumlah responden yang memiliki luas lahan kategori luas ( $> 1$  Ha) adalah sebanyak 13 orang atau 65 % dari total responden, sedangkan jumlah responden dengan luas lahan sempit ( $<1$  Ha) adalah sebanyak 7 orang atau 35% dari total responden. Hal ini menggambarkan pada umumnya responden memiliki lahan yang luas. Dengan tersedianya lahan memungkinkan untuk dilaksanakannya program-program kehutanan.

### **B. Pengembangan Hutan Rakyat di Desa Mangempang**

#### *1. Ketersediaan Lahan*

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Mangempang 65% dari 20 responden dikategorikan memiliki lahan yang luas. Lahan-lahan tersebut berpotensi untuk pengembangan Hutan Rakyat yang pola pengelolaannya dapat mengikuti pola kemitraan pada pengembangan Hutan Tanaman Rakyat.



Masalah kepastian status lahan dan kepemilikan saat ini menjadi isu strategis bagi rencana pengembangan Hutan Rakyat dengan pola kemitraan di Desa Mangempang sehingga perlu mendapat perhatian serius untuk menjamin kepastian dalam menjamin kerja sama. Oleh karena itu sebagai langkah antisipatif dalam mengelola HR di Desa Mangempang harus dimulai dengan penelaahan persyaratan yang di dalamnya terkandung informasi yang memadai untuk analisis kelayakan dibidang kepastian status lahannya. Status lahan menentukan juga langkah koordinasi sebagai tahapan kajian legalitas bagi masyarakat yang akan menggarap HR di Desa Mangempang apakah oleh instansi Pemerintah yang berwenang, misalnya oleh Badan Pertanahan Nasional atau Dinas Kehutanan

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan menyatakan bukti kepemilikan lahan masyarakat Mangempang sampai saat ini masih terbatas pada Surat Keterangan Tanah (SKT). Seharusnya sejak tahun 1984 tidak ada lagi SKT sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada Camat dan Kepala Desa No. 593/5709/SJ tanggal 22 Mei 1984 untuk tidak menerbitkan lagi SKT. Ini menyebabkan dasar kepemilikan lahan dari segi hukum sangatlah lemah, sehingga sangatlah rentang terhadap kemungkinan munculnya permasalahan lahan dikemudian hari.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan Hutan Rakyat dengan pola kemitraan hanya dapat terwujud apabila partisipasi masyarakat pemilik lahan yang memiliki keterbatasan modal dapat menjamin pengusaha untuk menjadi mitra. Hal demikian ini mengingat pembangunan hutan tanaman kurang dilirik oleh pelaku bisnis terutama pengusaha kecil dan menengah karena jangka waktu pengelolaan yang lama, sehingga perlu adanya kepastian bermitra. Sebelum menjalankan kemitraan, pengusaha melakukan analisis kelayakan mengenai kepastian lahan (legalitas lahan) maupun kelayakan ekonominya. Jaminan kepastian bekerjasama juga sulit diprediksi akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepastian lahan. Konflik internal masyarakat akibat perbedaan kepentingan yang semakin menggejala turut menjadi pemicu lemahnya jaminan kepastian status lahan, disamping masih belum baiknya

administrasi dan dokumentasi sistem pertanahan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian masalah kepastian status lahan dan kepemilikan saat ini menjadi isu strategis bagi perkembangan Hutan Rakyat dengan pola kemitraan di Desa Mangempang sehingga perlu mendapat perhatian serius untuk lebih menjamin kepastian dalam kerjasama. Oleh karena itu sebagai langkah antisipatif dalam menjalin kerjasama kemitraan pembangun Hutan Rakyat dengan pola kemitraan harus dimulai dengan penelaahan persyaratan yang didalamnya terkandung informasi yang memadai untuk analisis kelayakan dibidang kepastian status lahannya.

## *2. Syarat Peserta / Kelompok*

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, masyarakat Mangempang memiliki badan usaha (kelompok tani). kelompok tani tersebut sengaja dibentuk oleh masyarakat Mangempang pada tahun 2000 guna mengelola lahan milik mereka dalam bentuk agroforestry. Untuk mempermudah dalam pengurusan dan pengelolaan Hutan Rakyat sebaiknya masyarakat memiliki badan usaha atau membentuk kelompok.

Ketidak adanya koperasi di Desa Mangemapng merupakan masalah yang harus dihadapi dalam pengembangan Hutan Rakyat. Masyarakat di Desa Mangempang dalam mengusahakan hutan yang dikelolanya pada umumnya masih secara perorangan. Sampai saat ini belum ada koperasi yang terbentuk namun hanya sebatas kerjasama untuk mendistribusikan hasil ke pasar. Ketidak adanya KUD dapat mempengaruhi proses pembangunan Hutan Rakyat di Desa Mangempang. Kelembagaan masyarakat dalam wadah KUD akan memiliki peranan penting, terutama dalam membangun kerjasama saling menguntungkan antara masyarakat perseorangan yang mengelola lahannya sendiri dengan pihak KUD. Peranan penting dari lembaga KUD adalah untuk mengelola segala potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat, mengatur kesempatan kerja, membangun perekonomian local, mengelola insentif dan bantuan untuk pengembangan masyarakat, baik dari perusahaan, pemerintah atau pihak-pihak lainnya. Kendala

utama dalam pengembangan KUD adalah adanya keterbatasan sumberdaya manusia di Desa Mangempang. Sangat sulit sekali menetapkan SDM yang mampu menjadi penggerak penumbuhan lembaga tersebut, karena jarang ditemui SDM yang mampu mengelola administrasi kelembagaan dengan baik.

### 3. *Komoditi Yang Dapat Dikembangkan*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden di Desa Mangempang. Pada umumnya masyarakat berpikir untuk menanam suatu komoditi, hanya apabila komoditi tersebut dapat langsung dirasakan hasilnya. oleh karena itu tanaman-tanaman kehutanan yang memiliki daur yang panjang dirasakan oleh masyarakat mangempang kurang menguntungkan. Sedangkan dari komoditas hortikultura menjadi prioritas utama masyarakat mangempang untuk ditanam, dikarenakan hasil dari tanaman tersebut dapat langsung dirasakan dan akses pasar hortikultura menjanjikan. sehingga untuk menanam tanaman kehutanan diharapkan dari jenis tanaman yang berdaur pendek sehingga waktu tunggu untuk tanaman kehutanan tidak lama.

Komoditas yang dikembangkan di Desa Mangempang adalah dari komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan. Komoditas pertanian yang dikembangkan berupa padi, jagung dan kacang tanah. dan Komoditas dari tanaman perkebunan berupa coklat dan kopi. Sedangkan komoditas yang dapat tumbuh di Desa Mangempang dari jenis tanaman kehutanan berupa tanaman yang berumur pendek yaitu : Akasia (*Akasia mangium*), Sengon (*Paraseriathes falcat*), dan Gmelina (*Gmelina arborea*). Tanaman kehutanan tersebut berpotensi untuk direkomendasikan dalam pembangunan Hutan Rakyat di Desa Mangempang. Hal ini dikarenakan tanaman kehutanan tersebut dapat didampingkan dengan tanaman hortikultura. Selain itu jangka waktu tunggu tanaman kehutanan tersebut untuk dipanen tidak menunggu lama, sebagaimana tanaman kehutanan yang jangka waktu tungguanya sangat lama. Di dalam pengembangan hutan rakyat di Desa

Mangempang, tanaman hortikultura dijadikan sebagai tanaman kehidupan sedangkan tanaman kehutanan dijadikan sebagai tanaman tabungan yang nantinya akan dipanen hasilnya.

#### *4. Modal Masyarakat*


Keterbatasan modal dalam mengusahakan hutan menjadi kendala masyarakat di Desa Mangempang. Posisi lembaga keuangan (mikro/alternatif) dalam sistem keuangan nasional merupakan persyaratan yang harus segera ditindak lanjuti guna mengakomodasi karakteristik khusus pembangunan kehutanan di Desa Mangempang. Hal ini dikarenakan pembangunan hutan tidak bisa diagungkan (non collateral), produksi kehutanan bersifat jangka panjang (non bankable) dan resiko usaha yang tinggi sehingga investor kurang tertarik dalam melakukan pembiayaan pembangunan hutan.

#### *5. Aksesibilitas*

Desa Mangempang memiliki 4 dusun yaitu Dusun Mangempang, Dusun Kampung Baru, Dusun Bangkeng Batu, dan Dusun Datara. Ketiga dusun diatas kecuali Dusun Datara telah memiliki akses jalan yang baik. Ketidak adanya akses jalan ke Dusun Datara menyebabkan terhambatnya penyaluran bibit dan pupuk. Dalam penyaluran bibit dan pupuk masyarakat Dusun Datara hanya bergantung pada tenaga mereka sendiri. Jika dilihat dari letaknya yang berada pada dataran tinggi maka sudah selayaknya Dusun Datara diprioritaskan dalam membangun hutannya.

Pada tahun 2007 berdasarkan proposal-proposal yang diajukan oleh kepala desa untuk membangun jalan ke dusun Datara kepada pihak yang berwenang telah mendapatkan hasil. Dan pada awal tahun 2008 pembangunan jalan tersebut akan dilaksanakan. Dengan adanya bantuan masyarakat diharapkan akses jalan ke Datara dapat selesai pada akhir tahun 2008. Dengan adanya akses jalan ke Dusun Datara akan mendukung dalam pembangunan hutan di Desa Mangempang melalui program-program kehutanan.





Adanya akses jalan yang baik di Desa Mangempang akan membantu dalam proses pengangkutan kayu yang lebih baik. Pengangkutan kayu dalam setiap pengelolaan sangat penting untuk diperhitungkan. Ketidak adaanya akses jalan di tiap-tiap dusun akan berpengaruh pada pendistribusian hasil hutan. Selain itu pendistribusian bibit akan dirasakan sulit untuk disalurkan dengan ketidak adaannya jalan. Adanya akses jalan yang baik akan menjadi pertimbangan para pihak perusahaan yang akan bermitra dengan masyarakat untuk membangun Hutan Rakyat. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan salah satu responden di Dusun Datara menuturkan bahwa "perkembangan kehutanan di desa kami masih jauh dari yang diharapkan, dikarenakan tidak adanya jalan yang layak ke dusun kami. Hal ini yang menyebabkan pihak-pihak perusahaan yang memiliki bibit untuk ditanam tidak memberikan bibitnya kepada kami untuk kami tanam". berdasarkan penuturan masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya akses jalan menjadi pertimbangan pihak perusahaan untuk bermitra dengan masyarakat dalam membangun Hutan khususnya dalam pengembangan Hutan Rakyat di Desa Mangempang.

#### **6. Pola Pembangunan Hutan rakyat**

Pola pengembangan Hutan Rakyat yang akan dikembangkan di Desa Mangempang akan disesuaikan dengan pola yang terjadi di masyarakat agar memudahkan masyarakat memanfaatkan hasil hutan kayu. Kurangnya modal masyarakat di Desa Mangempang dalam mengusahakan lahannya menyebabkan pembangunan Hutan Rakyat dilakukan dengan pola kemitraan. Dalam pembangunan Hutan Rakyat dengan pola kemitraan masyarakat dapat menanam hutan tanaman dan perusahaan mengambil hasil Hutan Rakyat untuk diolah dan dipasarkan, sehingga ada suatu kerja sama yang bersinerji antara masyarakat dan perusahaan yang saling menguntungkan. Masyarakat mendapatkan keuntungan karena kayu yang ditanam ada yang mengambil dengan harga yang wajar, dan perusahaan mendapat keuntungan karena adanya jaminan ketersediaan bahan baku pabrik secara permanen.

Selain dari kurangnya modal masyarakat mangempang untuk menggarap lahan-lahan mereka, faktor pengetahuan dalam mengelola Hutan Rakyat menjadi kendala bagi masyarakat mangempang. Berdasarkan hasil wawancara dari 20 responden di Desa Mangempang diperoleh hasil 55% memiliki pendidikan yang rendah. Rendahnya pengetahuan masyarakat untuk mengelola lahan hutan mereka menyebabkan pola pembangunan Hutan Rakyat menggunakan pola kemitraan. Dengan menerapkan pola kemitraan yang dilakukan dalam pembangunan HTR di Desa Mangempang akan membantu masyarakat mangempang dari segi pengetahuan bagaimana menghasilkan hasil hutan berupa kayu yang lebih baik sehingga pemberdayaan masyarakat dalam mengelola hutannya menjadi lebih baik. Akan tetapi, inisiatif pembangunan HRPK diupayakan datang dari masyarakat mangempang, yang diwujudkan dalam permohonan kerjasama pembangunan HRPK dari masyarakat mangempang kepada mitra perusahaan. Hal ini penting, karena pengalaman menunjukkan bahwa perubahan keinginan masyarakat untuk mengubah tanaman hutan menjadi tanaman non kehutanan tidak menutup kemungkinan menjadi sumber permasalahan dan konflik dimasa yang akan datang, dan cenderung pihak perusahaan yang akan disalahkan. Adanya pola pikir masyarakat mangempang yang cenderung ingin menikmati langsung hasil yang mereka tanam dapat menyebabkan kemungkinan untuk merubah komoditas (tanaman kehutanan) yang ditanam menjadi komoditas hortikultura yang dirasakan oleh masyarakat mangempang lebih menguntungkan.

### *7. Pelayanan Pemerintah*

Adapun bentuk pelayanan pemerintah dalam mendukung pembangunan kehutanan di Desa Mangempang antara lain sebagai berikut : Pertama, Meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola hutan melalui penyuluhan-penyuluhan tentang kehutanan. Kedua, pemerintah memfasilitasi masyarakat mangempang yang mengelola lahan miliknya dengan tanaman - tanaman kehutanan melalui pemberian bantuan dana secara bertahap. Pemberian bantuan kepada masyarakat berdasarkan penuturan salah satu responden di berikan oleh pusat untuk lahan yang digarap akan



tetapi pemberian tersebut seringkali tidak tepat waktu. Hal ini mengingat bahwa pada akhir musim penghujan sehingga untuk menanam akan lambat. Ketiga, pemerintah memfasilitasi para insvestor untuk ikut serta dalam pembangunan kehutanan di Desa Mangempang.



Tabel 18. Kelayakan Pengembangan Hutan Rakyat di Desa Mangempang. Kec. Bungaya, Kab.Gowa.

No	Aspek Pengembangan HR	Kelayakan Pengembangan HR di Desa Mangempang
1	Ketersediaan lahan	Di Desa Mangempang terdapat kawasan berupa lahan milik masyarakat yang memungkinkan dikembangkannya Hutan Rakyat.
2	Syarat peserta	Masyarakat mangempang memiliki badan usaha sendiri. Akan tetapi, tidak memiliki KUD yang dapat memberi peluang kepada masyarakat yang ingin mengelola lahannya sendiri dalam skala yang kecil.
3	Komoditi	Komoditi yang dikembangkan oleh kelompok tani di Desa Mangempang yaitu dari jenis tanaman kehutanan berdaur pendek antara lain Berupa : Akasia ( <i>Akasia mangium</i> ), Sengon ( <i>Paraseriathes falcat</i> ), dan Gmelina ( <i>Gmelina arborea</i> ).
4	Modal masyarakat	modal masyarakat Mangempang masih terbatas sehingga untuk mengelola lahannya dilakukan dengan pola kemitraan untuk membantuk modal masyarakat.
5	Aksesibilitas lahan	Adanya akses jalan ke Dusun Datara dapat membantu dalam pengangkutan hasil hutan masyarakat mangempang.
6	Pola pembangunan Hutan	Pengembangan HTR Di Desa Mangempang tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya lahan berupa hutan produksi. Akan tetapi, di Desa Mangempang terdapat lahan milik yang layak untuk dikembangkan sebagai hutan rakyat dengan meniru pola kemitraan pada hutan tanaman rakyat.
7	Pelayanan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penyuluhan terkait dengan pembangunan kehutanan di Desa Mangempang.</li> <li>• Memberikan bantuan secara bertahap kepada masyarakat Mangempang yang menanam tanaman kehutanan.</li> <li>• Memfasilitasi para insvestor untuk ikut serta dalam pembangunan kehutanan di Desa Mangempang.</li> </ul>

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Desa Mangempang mempunyai lahan berstatus tanah milik (Surat Keterangan Tanah) yang potensial untuk dikembangkannya hutan rakyat.
2. Masyarakat mangempang memiliki kelompok usaha sendiri berupa kelompok tani dengan mengembangkan tanaman kehutanan dari jenis tanaman Akasia (*Acacia mangium*), Sengon (*Paraserianthes falcataria*), dan Gmelina (*Gmelina arborea*). Pelayanan pemerintah di Desa Mangempang yang telah dilakukan berupa penyuluhan terkait pembangunan hutan, pemberian bantuan secara bertahap, dan memfasilitasi insvestor untuk ikut membangun hutan.
3. Pengembangan Hutan Rakyat di Desa Mangempang dapat mengadopsi konsep pengembangan Hutan Tanaman Rakyat pola kemitraan.

### B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan disarankan agar pemerintah dapat mendukung pengembangan Hutan Rakyat di Desa Mangempang dengan membuka akses pasar dan bantuan permodalan bagi masyarakat yang membangun Hutan Rakyat pada lahan miliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. 2005. *Hutan dan Kehutanan*. Penerbit Kanisius : Yogyakarta
- Carol.J.P.C. Tanpa Tahun. *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat Hutan dan Perumusan Kebijakan Di Indonesia*. Terjemahan Oleh Ida, A.P.R. 2003. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Damin.S. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Departemen Kehutanan, 1996. *Materi Penyuluhan Kehutanan I*. Pusat Penyuluhan Kehutanan, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1999. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 41, Tentang Kehutanan*. Departemen Kehutanan : Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan*. Departemen Kehutanan : Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2007. *Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)*. Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan: Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2007. *Keputusan Menteri Kehutanan No. : P.23/Menhut-II/2007, Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman*. Departemen Kehutanan : Jakarta
- Didik.S. dan Dudung.D. 1998. *Kehutanan Masyarakat*. P3KM : Bogor.
- Emila dan Suwito. 2007. *Info Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Agenda Baru Untuk Mengentaskan Kemiskinan ?* (Online), ([ecs/survey/surveyhtml](http://ecs/survey/surveyhtml)., di akses 25 Agustus 2007)
- Helmi, Nuka.C.N., Gamal.P., Suryana. A. K., Budi.R., Markum, Supratman, Haryo.H., Onesimus.P., Roland.T.S.P., Kresno.A.H. 2006. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Departemen Kehutanan RI : Jakarta.
- Manan.B.1987. *Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Armico : Bandung.

- Marion.K. 2007. *Dephut Berikan Akses Luas Kepada Masyarakat Untuk Usaha HTR*. (Online), ([http://Kebijakan\\_ecs/survey/survey.html](http://Kebijakan_ecs/survey/survey.html)., diakses 20 Agustus 2007)
- Junus.M., Wasaraka, Fransz, Memet.R., Soeyitno.S., Sanggen, Mappatoba.S. 1984. *Dasar Umum Ilmu Kehutanan, Jilid II*. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Indonesia Timur : Makassar.
- Sambas.W. 2003. *Mendambakan Kelestarian Hutan Bagi Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat*. University Indonesia Press: Jakarta.
- Soebagio.M. dan Slamet Supriatna. 1987. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Akademika : Jakarta.
- Supriadi D, 2002. *Pengembangan Hutan Rakyat di Indonesia. Jurnal Hutan Rakyat*. Pusat Kajian Hutan Rakyat. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Zul. 2005. *Lahan Kritis Di Toba Jadi Hutan Tanaman Rakyat*. (Online), (<http://Kompas.com/kompas-cetak/0510/22/sumbagut/2146168.html>., diakses 21 Agustus 2007).